

# LAPORAN 2007

## Mewujudkan Hak Sosial Masyarakat Miskin Di Tengah Krisis Global



*Sekretariat ASPPUK*

*Jl. Pintu 2 TMII No.37 A RT 015 RW 03, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13560*

*Telp./Fax.021-8406172 email:asppuk@indo.net.ud website:<http://www.asppuk.or.id>*

## Kata Pengantar

Walaupun *reformasi* telah memasuki tahun ke-9, namun tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan rakyat. Bahkan semenjak tahun 1997, jumlah penduduk miskin makin meningkat. Bila sebelum krisis, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7 (tujuh) persen, maka setelah tahun 1997 mencapai angka minus 13%. Hal ini berakibat pada meluasnya gejala dan *kwalitas* kemiskinan, dan meningkatnya dampak krisis. Total angka penduduk miskin tahun 2007 berjumlah 37,17 juta, atau sekitar 16,58% dari total penduduk berjumlah 224,177 juta. Situasi tersebut makin parah akibatnya bagi perempuan, salah satunya memotivasi perempuan untuk mencari kerja ke luar negeri dengan perlindungan yang minim.

Fenomena di atas terjadi salah satu sebabnya karena masih kuatnya budaya *patriarkhi* di masyarakat dan pengambil keputusan. Sehingga berakibat pada kemunculan kebijakan yang “*gender blind*”. Di sisi lain *evoria* otonomi daerah (*UU 17 tahun 2003, UU No.32 tahun 2004, dan UU No.25 tahun 2005*) menambah panjang masalah, karena sebagian besar pemerintah daerah belum memasukan *perspektif keadilan gender* dalam penyusunan kebijakan. Temuan *Need Assessment Survey Women Section (WS)* di 20 kabupaten pada Juli 2004, menyatakan bahwa APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat kecil, terutama perempuan (*Kendari Pos, 12/10/05*).

Dalam konteks itu, masyarakat sipil mempunyai peran strategis untuk menjaga proses demokrasi supaya berjalan pada jalurnya. Di sini ASPPUK selaku jaringan nasional beserta JARPUK, terus memfasilitasi aliansi di tingkat kabupaten untuk berupaya agar proses demokratis di tingkat lokal berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat. Pengawasan dan monitoring ASPPUK beserta aliansinya terhadap kebijakan penggaran daerah dalam proses penyusunan APBD merupakan salah satu langkah kongrkitnya. Selain itu, penumbuhan inisiatif kreatif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemiskinan terus dilakukan ASPPUK beserta jaringannya.

Mudah-mudahan langkah ASPPUK dalam advokasi dan penumbuhan tindakan kongkrit untuk kesejahteraan rakyat miskin menjadi angin segar bagi gerakan rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Semoga...



*Lusi Herlina*  
*Komite eksekutif Nasional*

## DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i> .....	2
<i>Daftar isi</i> .....	3
<i>Latar belakang</i> .....	4
<i>Visi dan misi ASPPUK</i> .....	4
<i>Program Pokok</i> .....	5
<i>Kegiatan Pokok</i> .....	6
<i>A. Memfasilitasi dan menguatkan anggota asosiasi</i>	
<i>A.1 Fasilitasi NGO anggota untuk membangun tata laksana ASPPUK wilayah lewat Forwil (Forum Wilayah)</i> .....	6
<i>A.2 Pelatihan bagi pendamping usaha kecil</i> .....	7
<i>A.3 Pelatihan fund rising</i> .....	8
<i>B. Penguatan perempuan usaha kecil mikro (PUK-Mikro)</i> .....	8
<i>B.1 Pengembangan pemulihan ekonomi perempuan lewat pengembangan usaha di Bantul</i> .....	8
<i>B.2 Kegiatan proverty participatory assesstment (PPA)</i> .....	9
<i>B.3 Pendirian Lembaga Keuangan Perempuan (LKP)</i> .....	9
<i>B.4 Pelatihan Menejemen Keuangan Mikro bagi Pengurus LKP</i> .....	11
<i>B.5 Fasilitasi pengembangan pasar</i> .....	11
<i>C. Publikasi</i>	
<i>C.1 Pencetakan buku Studi Dampak LKP</i> .....	11
<i>C.2 Mengabarkan Berita PUK-Mikro melalui dunia maya</i> .....	12
<i>D. Advokasi dan networking</i>	
<i>D.1 Tingkat Jarpuk: menuntut hak, menagih janji</i> .....	12
<i>D.2 Tingkat Nasional: merubah pada aras nasional</i> .....	13
<i>E. Pengembangan Kapasitas lembaga</i> .....	13
<i>E.1 Pengembangan Sistem data base PUK</i> .....	13
<i>E.2 Monitoring Jarpuk</i> .....	13
<i>E.3. Pengembangan Konsep LKP</i> .....	14
<i>E.4. Konsoliasi Internal</i> .....	14
<i>Lampiran</i> .....	15
<i>A. Ringkasan Keuangan</i> .....	15
<i>B. Struktur ASPPUK</i> .....	16
<i>C. Jaringan kerja</i> .....	16
<i>D. Profil ASPPUK</i> .....	17

## ***Latar Belakang***

*Reformasi* Indonesia telah memasuki tahun ke-9. Namun begitu, terbukanya ruang demokrasi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan dan terjaminnya hak rakyat. Faktanya, korupsi makin merajalela sehingga tingkat kesejahteraan rakyat miskin – khususnya perempuan dan anak – kian memprihatinkan. Penyakit yang saat *Orde Baru* meredup (seperti *polio*, *gizi buruk*, *demam berdarah*, *muntaber*), kini muncul bersamaan dengan virus baru semisal *flu burung* dan *SARS*.

Situasi tersebut terjadi – salah satunya – karena hilangnya akses rakyat kepada sumber daya. Sebagaimana diungkap Amartya Sen, pemenang nobel pembangunan, bahwa kemiskinan bukanlah langkanya makanan, namun *raibnya* hak-hak sosial manusia terhadap sumber daya. Secara konseptual, negara Indonesia menjamin hak setiap warga untuk mengakses sumberdaya, seperti ditulis Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28, yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.

Bila sebelum krisis, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7 (tujuh) persen, maka setelah tahun 1997 mencapai angka minus 13%. Hal ini berakibat pada meluasnya gejala dan *kwalitas* kemiskinan, dan meningkatnya dampak krisis. Penduduk miskin Indonesia berkurang drastis dari 54,2 juta tahun 1976 menjadi 22,5 juta tahun 1996. Namun pertengahan tahun 1997, meningkatkan angka kemiskinan dari 22,5 juta (15%) sebelum krisis menjadi 36 juta (33%) pada akhir tahun 1998. Sehingga menyebabkan sekitar 36 juta penduduk Indonesia dalam kemiskinan. Namun begitu, semenjak krisis, angka kemiskinan mengalami fluktuatif dari 38,70 juta (19,14%) tahun 2000 menjadi 35,10 juta (15,97%) tahun 2005, dan tahun 2006 menjadi 39,30 juta (17,75%) pada bulan Maret (*BPS; 2006*). Sehingga total angka penduduk miskin tahun 2007 berjumlah 37,17 juta, atau sekitar 16,58% dari total penduduk berjumlah 224,177 juta.

Situasi kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja -- terutama di desa -- memotivasi rakyat (terutama perempuan) untuk mencari kerja ke luar negeri dengan perlindungan yang minim. Di sisi lain, jumlah perempuan kepala keluarga meningkat, dari 10% keluarga pada 1993 meningkat menjadi 13,19%. pada tahun 2003 akibat perceraian (12%), salah satu penyebabnya. Sehingga secara umum keluarga dengan perempuan sebagai kepalanya lebih miskin dibandingkan keluarga yang dikepalai lelaki. (*Base line Data PEKKA, 2002*)

Salah satu sebabnya ialah kuatnya budaya *patriarkhi* di masyarakat dan pengambil keputusan. Sehingga berakibat pada kemunculan kebijakan yang “*gender blind*”. Gambaran itu ditambah *eforia* otonomi daerah (hadirnya *UU 17 tahun 2003*, *UU No.32 tahun 2004*, dan *UU No.25 tahun 2005*).

Namun faktanya, kemiskinan masih menjadi persoalan besar Indonesia. Krisis moneter sejak tahun 1997, telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat.

Padahal sebagian besar pemerintah daerah belum memasukan *perspektif keadilan gender* dalam penyusunan dan implementasi kebijakan. Temuan *Need Assessment Survey Women Section (WS)* di 20 kabupaten pada Juli 2004, menyatakan bahwa APBD (anggaran pendapatan dan

belanja daerah) kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat kecil, terutama perempuan (*Kendari Pos*, 12/10/05). Penyusunan APBD merupakan langkah awal untuk *memotret* kesejahteraan rakyat miskin (dan perempuan) dalam satu tahun. Namun yang terjadi, penyusunan APBD sering diwarnai “*kongkalikong*” antara eksekutif dan legeslatif daerah. Sehingga dibutuhkan peran masyarakat sipil yang *berorentasi* kepada kesejahteraan rakyat.

Menyadari hal itu, sepanjang tahun 2007 ASPPUK, sebagai jaringan nasional dengan 58 Ornop anggota, masih melakukan “advokasi” pemenuhan hak rakyat miskin, terutama perempuan dan anak, selain juga mencoba membangun ketahanan ekonomi melalui pembentukan lembaga keuangan alternatif. Kegiatan tersebut menjadi bagian *integral* demi terwujudnya *Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender*. Hal ini penting, karena selain ASPPUK *menginisiasi inovasi* lokal dalam pengentasan pemiskinan dan kemiskinan, namun juga penyadaran rakyat bahwa setiap warga berhak atas “kesejahteraan”.

### **Visi Dan Misi ASPPUK**

#### Visi

Terwujudnya Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender.

#### Misi

- Memfasilitasi terbangunnya gerakan PUK-mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mewujudkan sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi.
- Memfasilitasi terbangunnya akses dan kontrol PUK-mikro terhadap sumberdaya ekonomi.

Dalam mewujudkan Visi dan mengemban Misi, ASPPUK berpegang pada nilai:

- Kesetaraan
- Keadilan
- Kebebasan
- Keterbukaan (*transparancy*).
- Keseimbangan; dan
- Anti kekerasan (*Non Violence*)

### **Program Pokok ASPPUK**

Secara garis besar, ASPPUK mempunyai tiga fokus program, yaitu; *pertama*, penguatan ornop anggota melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, *monitoring* dan studi kebijakan, publikasi, advokasi, pelayanan informasi; *kedua*, penguatan Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK-mikro) melalui pelatihan, studi banding, pelayanan usaha, studi dan pengembangan jaringan pasar; *ketiga*, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang visi dan misinya selaras dengan ASPPUK.

Dari ketiganya, kegiatan ASPPUK disusun sebagai upaya penguatan PUK-mikro. Semua kegiatan ASPPUK dilakukan melalui; *pertama*, dengan menggalang gerakan PUK-mikro di level *grassroot*; *kedua*, dengan melakukan perubahan kebijakan yang adil bagi PUK-mikro.

## **Kegiatan Pokok**

- Memfasilitasi dan Menguatkan Anggota Asosiasi
- Penguatan Perempuan usaha kecil-mikro..
- Membangun dan menguatkan Jaringan Pasar bagi Produk PUK-mikro
- Publikasi
- Advokasi Kebijakan
- Networking

## **Kegiatan Pokok**

### A. Memfasilitasi dan Menguatkan Anggota Asosiasi

Penguatan anggota ASPPUK dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya;

#### A.1. *Fasilitasi NGO anggota untuk membangun Tata Laksana ASPPUK Wilayah lewat FORWIL (Forum Wilayah)*

Forwil merupakan forum pengambilan keputusan ASPPUK Wilayah tertinggi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan diikuti seluruh NGO anggota ASPPUK di wilayah masing-masing. Forwil tahun 2007 dilaksanakan terlambat, karena ASWIL melakukan akreditasi dengan instrument TANGO yang dimodifikasi.

Kegiatan forwil diikuti seluruh NGO anggota di wilayah yang bersangkutan serta *representasi* JARPUK wilayah, khusus untuk wilayah NT -- acara diikuti seluruh ketua JARPUK NT-- khususnya pada saat forum pertanggungjawaban pengurus/KEW. Kehadiran JARPUK merupakan proses pembelajaran kedua belah pihak, karena memungkinkan klarifikasi kegiatan ASPPUK wilayah dan NGO anggota dalam pendampingan JarPUK.

Forwil berisi laporan kegiatan pengurus ASPPUK wilayah dan pembahasan/pengesahan, dan laporan akreditasi anggota. Dari 5 wilayah yang tegas dalam pelaksanaan akreditasi adalah wilayah Nusa Tenggara. Pada tahun 2007, wilayah ini melakukan sanksi kepada 3 NGO anggota dengan menurunkan predikat keanggotaan menjadi partisipan, karena terbukti tidak aktif melakukan pendampingan dan melakukan tindakan tidak *akuntable*.

Secara umum hasil kegiatan Forwil di 3 wilayah antara lain :

- Terumuskan Program Strategis ASPPUK wilayah yang berbasis pada kebutuhan PUK, dengan *prioritas* pada pengembangan usaha dan fasilitasi advokasi untuk akses dalam kebijakan publik.
- Ada kesepahaman tentang posisi LKP dalam konteks gerakan JARPUK, serta ada keragaman model pengorganisasian JARPUK dan LKP, tetapi masing-masing memiliki arah yang sama dalam gerakan PUK.
- Adanya komitmen untuk terus mengupdate data PUK, dan menggunakan moment pendataan PUK sebagai langkah konsolidasi JARPUK di masing-masing wilayah.
- Disadari bersama bahwa permasalahan PUK (pentingnya peningkatan kemampuan usaha, perlunya jaringan pasar, peningkatan kesadaran kritis) menjadi catatan bagi semua NGO pendamping dan akan menjadi komitmen lembaga masing-masing dalam tindaklanjutnya.

- Akreditasi dengan alat TANGO akan terus dilakukan sebagai salah satu upaya

### *A.2. Pelatihan Bagi Pendamping Usaha Kecil*

Pelatihan ini dilaterbelakangi kondisi pendamping PUK merasa kekurangan pengetahuan bisnis. Oleh karenanya, pelatihan pendampingan usaha kecil-miko bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman kapasitas pendamping PUK. Pelatihan memberikan gambaran akan kelemahan pendamping, terutama “*sense of bisnis*”.

Dalam pelatihan, peserta berefleksi dan mendapatkan jawaban atas kesulitannya selama pendampingan pengembangan usaha. Hal itu diungkap Husna pendamping JARPUK kota Kendari

*“...bila mengikuti pelatihan dan mendengar secara intensif apa yang diungkap fasilitator, maka kita sebagai pendamping perlu banyak belajar lagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan usaha. Karena bila kita tidak terus mengupdate, maka bisa-bisa kita kalah dengan JARPUK yang menjadi dampingan...ha...ha....”*. Pernyataan serupa diungkap Dian, peserta dari Nusa Tenggara. *“.....ini jawabnya, mengapa pendampingan kita ga pernah maju, karena pendampingnya sendiri juga baru tau sekarang tentang pengembangan usaha...”*.

Pelatihan di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi, serta Jawa menghadirkan nara sumber praktisi dari Mitra Bisnis, yang memberikan materi yang tidak jauh berbeda yakni tentang kewirausahaan, perencanaan bisnis, pemasaran maupun manajemen produksi, dan beberapa trik untuk pendampingan dan pengembangan bisnis.

### *A.3. Pelatihan Fund-Raising*

Kegiatan pelatihan *Fund-Raising* (FR) dilakukan di 3 wilayah. Di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi, serta Jawa, waktunya berhimpitan dengan kegiatan “pelatihan pendampingan”, karena efektifitas dan ketersediaan waktu peserta dan nara sumber. Pelatihan memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang teknik *Fund-Raising* yang relevan dan realistis. Model FR yang *dieksplorasi* terdiri dari berbagai sumber, baik untuk kepentingan kemanusiaan, program dan secara khusus bersumber dari kegiatan bisnis, karena relevan dengan karakter aktifitas ASPPUK.

Dari proses pelatihan di ketahui bahwa beberapa NGO anggota telah melakukan FR, namun tidak secara cermat dan dikelola berkelanjutan. Oleh karenanya setelah pelatihan anggota *terinspirasi* untuk melakukan FR secara profesional. Misalnya, di wilayah Kendari peserta akan melakukan bisnis telekomunikasi (akses siasar TV melalui jaringan kabel) untuk satu wilayah hunian, sedangkan untuk wilayah Kupang akan memulai bisnis makanan “Ikan bakar”.

## **B. Penguatan Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK-mikro)**

### *A.1. Pengembangan Pemulihan Ekonomi Perempuan Lewat Pengembangan Usaha di Bantul*

Gempa Bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terjadi pada 27 Mei 2006, mengakibatkan 5.782 meninggal dunia orang dan korban luka-luka 36.300 orang (<http://menkokesra>). Namun

yang tak kalah penting adalah terancamnya kapasitas usaha ekonomi mikro yang selama ini digeluti kalangan ekonomi lemah, terutama perempuan.

Di Klaten, 11.892 dari total 34.783 tempat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hancur akibat gempa (*Kompas, 13 Juni 2006*). Usaha Mikro Kecil ini tersebar di 12 kecamatan di Klaten, pada umumnya bergerak di bidang perdagangan, industri pertanian, nonpertanian, bahan bangunan, dan aneka jasa. Di Klaten perempuan merupakan mayoritas pelaku usaha mikro kecil, baik sebagai buruh maupun pelaku usaha mandiri, khususnya dalam bidang perdagangan. Keadaan serupa terjadi di Yogyakarta, peran perempuan dalam memutar perekonomian di tingkat lokal amatlah besar.

Dengan bekal pengalaman dan jaringannya, ASPPUK ikut berkontribusi membangun kembali aset usaha PUK di Yogyakarta, terutama di Bantul melalui 6 (enam) kegiatan, diantaranya; pengorganisaian (memfasilitasi melalui pembentukan kelompok, konsultasi melalui pendampingan, pelatihan), layanan informasi, pelayanan modal, pelayanan pengembangan pasar, pelayanan untuk kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak (khususnya perempuan), dan advokasi. Diantara *outputnya; pertama*, tumbuhnya kelompok perempuan usaha kecil yang kuat, *kedua*, tumbuhnya usaha kecil-mikro yang dikelola perempuan, *ketiga*, munculnya kemampuan ekonomi keluarga miskin.

#### ***A.2. Kegiatan Proverty Participatory Asesment (PPA)***

Kegiatan asesment tentang kemiskinan berdasarkan *perspektif masyarakat miskin* merupakan hal baru bagi PUK dan JARPUK. Selama ini assessment profil kemiskinan didefinisikan pemerintah maupun pakar yang ditunjuk. Di tahun ini PPA dilaksanakan pada tiga wilayah; yaitu Jawa yang diadakan di Pacitan, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Dalam prosesnya, masyarakat melakukan *asesment* langsung ke lokasi disamping melakukan kajian kebijakan pada tingkat kabupaten. Kegiatan PPA dilaksanakan antara 4 – 6 hari, yang terdiri; 3 hari melakukan survey lapang, dan 3 hari melakukan analisa di kelas. Dalam PPA digunakan beberapa tehnik PRA seperti; diagram Venn, FGD, wawancara mendalam serta analisa sosial. Dari berbagai tehnik tersebut terkumpul data dan selanjutnya di analisis bersama.

Sebagai contoh di Pacitan, PPA mampu mempetakan proses pemiskinan yang dialami masyarakat sekitarnya, dan secara khusus terjadi pemiskinan pada kasus produses “Gula Jahe”. Selain itu dari hasil PPA, direfleksikan tentang ketidak efektifan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, karena dalam analisis mereka program tersebut justru mendukung proses pemiskinan.

Dari pelaksanaan PPA, peserta memiliki harapan besar terhadap tindak lanjut di wilayah masing-masing. Sebagaimana diungkap ibu Tuntut, pengurus JARPUK Pacitan, “.....*hasil PPA ini bisa menjadi bahan JARPUK untuk melakukan tuntutan kepada pemrintah di tingkat kabupaten tentang kondisi kemiskinan. Sebab bila kita tidak meneruskan hal ini, maka sia-sia kita melakukan kerja keras dalam menggali issu kemiskinan..*” Dari pengalaman di 3 wilayah tersebut menjadi masukan bagi ASPPUK untuk memperluas kegiatan PPA di tiap wilayah JarPUK sebagai basis “*Advokasi Kemiskinan*”.



### B.3. Pendirian LKP

Pendirian LKP dimulai dengan assessment. Kegiatan assessment di tahun 2007 dilaksanakan di 2 (dua) wilayah yakni kab. Banjarnegara dan kab. Bima. Kegiatan assessment pendirian LKP diawali dengan pembekalan metode PWR (*poverty welt rangking*) bagi kader KPUK. Dengan menggunakan tehnik tersebut, maka terkumpul sejumlah informasi untuk penyusunan rencana LKP. Proses dan hasil assessment memberikan pembelajaran dan manfaat baik bagi anggota.

Dari hasil assessment diketahui bahwa JARPUK Banjarnegara dan Bima perlu melakukan langkah strategis sebelum mendirikan LKP, seperti pendidikan dan pengorganisasian di lingkup kabupaten, dan membangun relasi dengan lembaga keuangan maupun organisasi perempuan yang lain, serta kontinuitas pendampingan dari NGO anggota. Dengannya seknas (sekretariat nasional) mendapatkan gambaran dalam menilai kelayakan JARPUK. Selain itu, mereka juga telah memiliki LKP, namun masih lambat dalam mengakumulasi permodalan.

Setelah assesment dan rekomendasi dijalankan, ASPPUK menyalurkan modal stimulan untuk melengkapi permodalan LKP. Pendirian LKP dilakukan dengan upaya membangun kemampuan para pengelola LKP, sehingga pelayanannya berjalan lancar dan *akuntable* serta memenuhi prinsip administrasi yang benar. Kegiatan pendirian LKP dilakukan beragam, diantaranya ada yang menggunakan pertemuan, atau pelatihan keuangan sederhana. LKP yang melakukan pelatihan dalam pendiriannya *diasistensi* nara sumber dan NGO pendamping. Kegiatan pendirian LKP bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan pengelolaan LKP sebagai satu upaya pengamanan asset.

Pada tahun program periode 2007 telah digulirkan modal stimulan kepada 2 (dua) LKP (kab. Banjarnegara dan kab. Bima) dan satu lagi kepada LKP Solo. Khusus untuk LKP kota Solo, PUK sebelumnya telah mendapatkan dukungan dana dari program LKP kerjasama dengan TDH (*Terre dos Home*) – tetapi karena sifatnya pinjaman dan tahun 2007 merupakan batas pengembalian, maka perkuatan modal digunakan untuk menjaga likuiditas keuangan pasca penarikan modal dari TDH. Berikut daftar LKP hingga tahun 2007 sebagai berikut:

No	Nama NGO	Wilayah ASPPUK, dan lokasi LKP	Nama LKP
1.	LPPSLH	ASPPUK Jawa, di Purwokerto	JAPPUKMAS
2.	YKP	ASPPUK Jawa, di Boyolali	Perdana Putri Mandiri
3	Y. Panca Karsa	ASPPUK NT, di Lombok Tengah	LKP Loteng
4	LML	ASPPUK Sulawesi, Kab. Gowa	LKP Jarpuk Gowa
5	Madafaku	ASPPUK NT, Kab. Dompu	Jarpuk Dompu
6.	ALPEN	ASPPUK Sulawesi, Muna	LKP Muna
7.	Kemasda	ASPPUK Sumatera, di Palembang	Melati
8.	LP2M	ASPPUK Sumatera, kota Padang	Gapermita

9.	PKBI Bengkulu	ASPPUK Sumatera, Bengkulu Utara	Harapan Kita
10.	LP2SD	ASPPUK NT, di Lombok Timur	LKP Titian
11	LPTP	ASPPUK Jawa. Di kota Solo	Ngudi Lestari
12.	YLWD	ASPPUK Jawa, di Surabaya	LKP Jarpuk LUPUS
13	Persepsi	ASPPUK Jawa, di Kudus	LKP Jarpuk Kudus
14.	ALPEN	ASPPUK Sulawesi, kota Kendari	LKP Jarpuk Kendari
15.	LPTP	ASPPUK Jawa, kab. Pacitan	Jarpuk Pacitan
16.	Annisa	ASPPUK NT, Lombok Barat	Jarpuk Lobar
17	ASPPUK Kalimantan	ASPPUK Kalimantan, Kota Pontianak	Jarpuk Pontianak
18	YPPSE	ASPPUK Jawa, Banjarnegara	JARPUK kab. Banjarnegara

#### ***B. 4. Pelatihan Manajemen Keuangan Mikro bagi Pengurus LKP***

Untuk peningkatan kemampuan pengelolal LKP, sekretariat nasional ASPPUK bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Sejahtera (salah satu NGO anggota ASPPUK) menyelenggarakan pelatihan “Managemen Keuangan Mikro”, pada tanggal 20 – 25 Februari 2007, di Hotel Riyadi Palace, Solo. Pelatihan diikuti pengurus LKP dari beberapa wilayah, seperti Jawa (2 wilayah), Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera.

Bagi Pengurus JarPUK pelatihan manajemen keuangan mikro berguna untuk membekalinya dalam mengontrol manajemen LKP. Sebagaimana diungkap ibu Rubiyani, PUK Kendari “... yaa...selama ini saya hanya percaya saja ke pengelola LKP...saya selalu menerima laporan, tetapi sulit untuk membacanya...”. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan meliputi; pembukuan dasar, proses pembukuan hingga membuat laporan neraca rugi laba, teknik pendampingan, teknik mobilisasi dana, cara menghitung bunga kredit, menghitung harga kredit, analisa permohonan pinjaman, perencanaan kredit, pengelolaan kredit bermasalah, monitoring pinjaman dan studi banding.

Dalam pelatihan tersebut, pengurus diperkenalkan dengan sistem keuangan yang digunakan YIS untuk diadaptasi. Selain itu, hal tersebut juga sebagai kelanjutan dari pelatihan kerjasama antara YIS dan sekretariat yang dikirim untuk memberikan asistensi adaptasi sistem keuangan pada komputer LKP. Sistem keuangan yang dipakai masih sangat basic, meliputi; pembukuan, penghitungan SHU dan pelaporan keuangan.Neraca. Dalam hal itu, petugas melakukan entry data ke dalam sistem dan langsung bisa dilihat hasilnya berupa aspek yang diminta (misalnya; menghitung bunga, SHU, Neraca).

### ***B.5. Fasilitas Pengembangan Pasar***

Kegiatan dilakukan untuk mendorong pengembangan dan pemasaran produk melalui *showroom* dan pameran. Pendirian *showroom* setelah dilakukan studi kelayakan. Pengembangan pasar melalui pameran di tingkat nasional dan wilayah. Pameran nasional difasilitasi Sekretariat Nasional ASPPUK. Sedangkan untuk Jawa, setiap JARPUK khususnya di Klaten, Solo dan Sukoharjo, masing-masing difasilitasi kesertaan dalam pameran di tingkat Kabupaten.

Pengembangan *showroom* wilayah NT dilakukan dengan *sharing* bersama salah satu usaha lokal, untuk menempati tempat usaha/toko untuk penjualan. Sedangkan di Jawa, pemasaran dilakukan dengan kerjasama dengan menempati ruang pameran produk ketua JARPUK. *Sharing* dilakukan dengan cara mengambil produk anggota saat ada pameran dan kunjungan tamu. Untuk Wilayah Sulawesi, JARPUK memfasilitasi anggota pameran di tingkat Lokal. Saat ini wilayah NT memutuskan untuk membuka kios dengan sistem *sharing* dengan salah satu anggota, sebagaimana dilakukan di wilayah Solo.

## **C. Publikasi**

### ***C.1. Pencetakan Studi Dampak LKP***

LKP sebagai lembaga keuangan *alternatif* sudah berjalan hampir 4 (empat) tahun. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak manfaat dan problem dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk hal tersebut dilakukan studi yang melihat dampak LKP. Studi ini melibatkan seluruh komponen yang selama ini terlibat dalam penumbuhan LKP, dan didampingi konsultan untuk memberikan masukan *metodologi*.

Dari studi diketahui meskipun kondisi keuangan LKP kecil, dan perputaran terbatas, namun keberadaannya secara substansial memberikan makna bagi PUK. Lebih jauh diketahui bahwa LKP memberikan dampak pada 4 level cakupan yakni level Individu pengguna, usaha PUK, Rumah Tangga dan level komunitas. Sebagaimana pengakuan beberapa informan. LKP bisa membantu anggota pada level individu, meningkatkan akses, memudahkan biaya pendidikan dan meningkatkan rasa percaya diri. Ibu Andi Murniati anggota LKP Kendari, bergabung sejak 2006, mendapat pinjaman 2 kali, masing-masing 1 Juta rupiah, meskipun jumlah tersebut masih kurang, menurutnya sudah sangat berarti karena LKP adalah satu-satunya tempat baginya untuk meminjam. Pada level rumah tangga, LKP memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, sebagaimana dialami Nahrin, Kebon Talo, Selong. Sebelumnya paling banyak mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 setiap bulan dari usaha jualan di Kantin, sekarang bisa mendapat keuntungan Rp. 110.000 setiap hari.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa LKP memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan perumahan. Hal tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui diperolehnya akses terhadap aspek di atas.

## **C.2. Mengabarkan Berita PUK-mikro Melalui Dunia Maya**

Semenjak ASPPUK meluncurkan website pada tahun 2003, media ini membantu peran jaringan. Apalagi Indonesia terdiri dari gugusan pulau yang membutuhkan waktu dan biaya besar untuk merangkai jalinan komunikasinya. Berkenan dengan itu, sekretariat nasional ASPPUK sebagai lokus jaringan, menata sistem informasinya dengan mengembangkan website ASPPUK dengan menambah sejumlah display produk.

Selain fungsi informasi, *web-site* yang diharapkan menjadi media promosi produk, belum berjalan dengan lancar karena up-date penyedia konten website dari anggota masih rendah, khususnya produk yang belum disertai katalog/informasi produk. Kendala ini diharapkan bisa di atasi, karena ASPPUK sedang melakukan pendataan ulang terhadap identitas PUK sekaligus produknya. Di sisi lain ASPPUK pada tiap-tiap wilayah saat ini telah merintis *show room*, diharapkan informasi produk yang ada di showroom tersebut dalam di akses langsung melalui web- ASPPUK.

## **D. Advokasi dan Networking**

### ***D.1. Tingkat Jarpuk; Menuntut Hak, Menagih Janji***

Di tahun 2007, JARPUK di kabupaten tertentu tetap melakukan advokasi yang berkaitan dengan penganggaran. Hal itu seperti terjadi di kab. Klaten dan kab. Wonogiri Jarpuk mendesakkan Peraturan Desa (Perdes) tentang keterlibatan /partisipasi perempuan dalam kebijakan di tingkat Desa (penyusunan Raperdes). Sementara untuk Wilayah Wonogiri di desa manyaran, perdes tersebut sudah disyahkan. Kemudian di Boyolali, JARPUK mencoba menggagas legal drafting yang berkaitan dengan isu Globalisasi.

Dari legal drafting JARPUK optimis bisa melakukannya, sebagaimana diungkap Yanti Susanti, pendamping JARPUK Klaten “....peserta antusias dan mereka yakin apabila draf PerDes disetujui- aspirasi mereka akan lebih didengar dalam wilayah publik, tapi ada juga yang dari awal kurang yakin apakah mereka mampu menyusun konsep seperti itu (legal draf-PerDes ) ...”. Senada dengan hal ini adalah pengalaman JarPuk Gowa di Sulawesi Selatan seperti yang diungkap Annisa ketua LKP dan anggota JARPUK Gowa, “.....alhamdulillah beberapa rekomendasi JARPUK yang tergabung dalam dalam aliansi – sedikit banyak – mulai didengar. Lihat saja, anggaran dalam kesehatan dan perencanaan pengguliran modal bagi UMKM mulai dimasukan....”.

JarPUK Gowa, Kendari, Kalimantan dan Kupang sampai saat ini masih aktif melakukan advokasi untuk isu anggaran, kegiatan ini secara intensif difasilitasi olehh NGO pendamping di wilayah masing-masing, beraliansi dengan organisasi lain di wilayah mereka.

### ***D.2. Tingkat Nasional; Merubah pada Aras Nasional***

Analisa kebijakan di tingkat Nasional juga dilakukan oleh beberapa perwakilan Jarpuk bersama Jaringan Perempuan Akar Rumput di Jakarta. Mereka melakukan advokasi untuk isu keadilan di

bidang hukum, sehingga mereka mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam hukum terhadap perempuan usaha kecil. Selain itu, ASPPUK secara khusus memfasilitasi JARPUK untuk bersama melakukan gugatan atas Undang-Undang Penanaman Modal, kegiatan ini beraliansi dengan serikat Petani, Buruh dan Perempuan, dengan pusat aktifitas di Jakarta.

Selain kegiatan diatas pada aras nasional advokasi juga muncul, seperti;

1. Keterlibatannya sekretariat nasional dalam pengkritisan RAPBN 2008, yang beserta masyarakat sipil lainnya melakukan analisis anggaran nasional pada bulan November dan Desember 2007.
2. Aktif dan berpartisipasi dalam advokasi masyarakat sipil untuk pencapaian MDGs (Millenium Development Goals). Dalam hal itu, ASPPUK juga menjadi anggota aktif dalam Koalisi masyarakat sipil untuk MDGs.
3. Keterlibatannya secara aktif dalam kampanye tentang anti pemiskinan dan pemasukannya isu “kemiskinan” dalam SNPK (strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan), yang digagas GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia). Dalam hal itu, ASPPUK menjadi anggota GAPRI.
4. Secara aktif, ASPPUK juga terlibat dalam *E-net fo Justice (Education Network)*, yaitu jaringan nasional yang memperjuangkan pendidikan untuk keadilan di Indonesia. dalam hal itu, ASPPUK terlihat aktif untuk mengkritisi sistem pendidikan Indonesia yang sudah mengarah kepada “komersialisasi” sebagai efek dari “privatisasi” negara.
5. Aktif dalam bersama NGO lain mengajukan “judicial review” atas UU penanaman modal asing yang tidak berpihak kepada rakyat.

## **Pengembangan Kapasitas Lembaga**

### ***E.1. Pengembangan Sistem data base tentang PUK***

Kegiatan ini mendukung fungsi ASPPUK sebagai jaringan Nasional. Yang terjadi selama ini, banyak data yang dikumpulkan di sekretariat nasional, namun pengolahannya menggunakan keahlian orang lain. Oleh karenanya, sekretariat mengembangkan system informasi pelayanan berupa system Komputerisasi Data tentang data PUK. Kegiatan penyusunan data base dengan komputerisasi dilakukan bekerjasama dengan *Lembaga Jaring*, yang ahli dalam pengembangan data melalui sistem informasi. Hasil data base ini bisa diakses JARPUK yang telah ikut mendata anggota PUKnya.

### ***E.2. Monitoring JARPUK***

Monitoring secara teratur dilakukan ASPPUK (baik melalui seknas maupun sekwil) setiap 6 bulan. Sebelum monitoring dilakukan, setiap LKP wajib mengirim laporan kepada seknas ASPPUK (dan di tembuskan ke ASPPUK wilayah) setiap tiga bulan. Dari laporan tersebut, perkembangan LKP dan JARPUK secara tertulis terlihat. Disamping itu, monitoring juga dilakukan Komite eksekutif Nasional dan ASPPUK wilayah – dalam setiap forum wilayah -- setiap satu tahun sekali.

Hasil monitoring terlihat bahwa LKP dan JARPUK masih dalam proses pembenahan dan LKP memiliki potensi besar sebagai penguatan ekonomi, tetapi rawan terjadi *elitisasi*. Untuk

antisipasi dan mengatasi masalah diatas - ASPPUK secara tertulis menerbitkan panduan konsep LKP untuk dibagikan kepada NGO anggota dan menjelaskan tentang landasan dasar, mekanisme-prosedur serta sasaran LKP.

### ***E.3. Pengembangan Konsep LKP***

Sebagai penanggung jawab nasional atas keberlangsungan LKP di sejumlah kabupaten, sekretariat nasional diberi amanat untuk membangun konsep Lembaga Keuangan Perempuan. Konsep LKP sebenarnya sudah terbangun semenjak LKP mulai berdiri di tahun 2002. Namun dalam perkembangannya hal itu banyak menemui problematika yang harus disesuaikan dengan tuntutan kondisi.

Untuk menghadapi itu pada tahun 2005, sekretariat nasional beserta Tim kecil – sebagian yang pernah menggagas berdirinya LKP – mengadakan lokakarya terbatas untuk membahasnya. Sejumlah ide terungkap, yaitu berupa rekomendasi kepada sekretariat nasional diamanatkan untuk menyelesaikan konsep LKP terbaru, berdasarkan kerangka yang disusun Tim kecil. Kini, konsep LKP sudah disusun dengan berdasarkan hasil rekomendasi dengan menuangkan sejumlah hal baru, seperti peran masing-masing komponen (seperti ASPPUK nasional, Ornop Pendamping, dan JARPUK).

### ***E.4. Konsolidasi Internal***

Peningkatan kapasitas lembaga merupakan kegiatan yang penting, sehingga kegiatan ini terumuskan dengan jelas di pedoman tertulis ASPPUK (AD/ART, Peraturan khusus). Dalam hal itu, sekretariat nasional bertugas untuk memfasilitasi terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas tersebut, diantaranya;

- Rapat Pengurus ASPPUK, yang diikuti KEN (Komite Eksekutif Nasional), KEW (Komite Eksekutif Wilayah), SEN (Sekretaris Eksekutif Nasional), SEW (sekretaris Eksekutif Wilayah) diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- Pertemuan pengurus KEN dengan SEN minimal 6 (enam) bulan sekali.
- Forum Wilayah yang dihadiri oleh setiap Ornop anggota yang ada di wilayah masing-masing, diadakan setiap satu tahun sekali.

## Lampiran

### A. Ringkasan Keuangan

Penerimaan				
• Hivos		Rp.	1,050,972,596	
• New Zealand Embassy (NZ)		Rp.	1,136,405,925	
• Partnership		Rp.	384,421,093	
• Pocari Sweat		Rp.	71,400,000	
• Ford Foundation		Rp.	941,705,100	
• Iuran Anggota		Rp.	1,000,000	
• Fee Lembaga Asppuk		Rp.	48,764,768	
Jumlah Penerimaan				Rp.3,634,669,482

### Pengeluaran program:

• Program New Zealand	Rp.	786,805,925
• Program TDH	Rp.	29,583,000
• Program Exxon Mobile	Rp.	3,000,000
• Program Hivos	Rp.	348,783,050
• Program Part nership	Rp.	64,225,270
• Program Pocari Sweat	Rp.	80,885,150
• Program ABN Amro	Rp.	833,440,000
• Program Gempa Persepsi	Rp.	64,225,270
• Program Ford Foundation	Rp.	784,954,750
• Pengembangan Jaringan	Rp.	29,261,300
• Pengembangan Staff	Rp.	2,653,900
• Pengembangan Lembaga	Rp.	34,599,900
• Pengembalian Sisa Program TDH	Rp.	20,037,657
Jumlah Pengeluaran		3,082,455,172

## Beban Operasional

• Operasional Jaringan	Rp. 436,856,187
Jumlah Beban Program	Rp. 436,856,187
Total Pengeluaran	Rp. 3,519,311,359
Sisa Dana tahun 2007	Rp. 115,358,123

## B. Struktur ASPPUK

Keterangan Struktur :

1. FORNAS adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dan yang memilih Komite Eksekutif Nasional (KEN), Sekretaris Eksekutif Nasional (SEN), dan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).
2. Komite Eksekutif Nasional (KEN) adalah kelembagaan yang merupakan representasi anggota dari masing-masing wilayah yang ditetapkan dalam Forum Nasional (FORNAS) ASPPUK. Jumlah KEN adalah 5 (lima) orang yang mewakili 5 (lima) ASPPUK wilayah yang ada.
3. Sekretaris Eksekutif Nasional adalah pelaksana harian program ASPPUK Nasional yang dibantu beberapa orang staf, dan berkedudukan di Sekretariat Nasional, di Jakarta.
4. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) adalah kelembagaan yang dipilih dan ditetapkan dalam Forum Nasional ASPPUK yang bertugas merumuskan substansi, dan instrumen penegakkan kode etik, serta memediasi konflik kelembagaan ASPPUK.
5. Komite Eksekutif Wilayah adalah kelembagaan yang merupakan representasi anggota yang ditetapkan dalam Forwil. Ia terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili anggota di wilayahnya.
6. Forum Wilayah (Forwil) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Forum Wilayah ASPPUK di wilayah.
7. Ada 5 Forwil ASPPUK, yaitu : Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Sumatera, Jawa dan Sulawesi dan Maluku
8. Sekretaris Eksekutif Wilayah (SEW) adalah pelaksana harian program ASPPUK wilayah, yang berkedudukan di masing-masing wilayah (5 wilayah).
9. Anggota : Ornop dari seluruh Indonesia, berjumlah : 52 anggota , 40 partisipan, yang tersebar di 22 propinsi

## C. Jaringan Kerja

TDH	Terre Dos Home, Belanda
NZAID	New Zeland Embassy
Hivos	Belanda
Ford Foundation	Inggris
OXFAM GB	Inggris



KIKIS	Kelompok Kerja Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan Struktural.
JEKORA	Jaringan Advokasi Ekonomi Kerakyatan
JNPUKM	Jaringan Nasional Pengembangan Usaha Kecil-Menengah
E-net For Justice Indonesia	Jaringan Pendidikan untuk Keadilan Indonesia
GERAK LAWAN	Gerakan untuk menentang UU Permodalan

#### D. Profil ASPPUK

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) merupakan organisasi jaringan, yang beranggotakan Ornop yang peduli terhadap penguatan perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro). Sejak berdiri, ASPPUK membangun gerakan masyarakat sipil melalui penguatan PUK-mikro.

Kelahiran ASPPUK bermula dari kepedulian sejumlah Ornop terhadap peminggiran peran perempuan di bidang pengembangan ekonomi. Padahal, pada kenyataannya 46,23 % perempuan merupakan pelaku ekonomi. Sebagai akibatnya, hak-hak ekonomi, sosial dan politik perempuan masih kurang terfasilitasi.

Berdasarkan pemahaman tersebut, beberapa Ornop di atas membentuk satu jaringan, yang pada Forum Nasional yang pertama tanggal 11-12-1997, diberi nama Yayasan Pendamping Perempuan Usaha Kecil (YASPPUK). Namun dalam perjalanan waktu, di Forum Nasional kedua, 24-27 Februari 2001, disepakati oleh semua anggota bahwa bentuk kelembagaan YASPPUK berubah menjadi Asosiasi, yang bernama ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil).

Selanjutnya, lembaga ini disahkan berbadan hukum perkumpulan berdasarkan akte notaris No.1 17/04/2001, Terdaftar: PN-Jaktim 19/Leg/2001, Direktorat Jendral Bina Kesatuan Bangsa, dengan nomor 20/D.I/I/2002.